

## Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa

### The Effect Of Village Government Accountability And Transparency On Community Participation In Village Infrastructure Development

Nupsi<sup>1)</sup>; Kresnawati<sup>2)</sup>; Suswati nasution<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Universitas Dehasen Bengkulu

Email: <sup>1)</sup> [nnopsi648@gmail.com](mailto:nnopsi648@gmail.com)

#### How to Cite :

Nupsi., Kresnawati., Nasution, S.. (2025). The Effect Of Village Government Accountability And Transparency On Community Participation In Village Infrastructure Development. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 2(1).

#### ARTICLE HISTORY

Received 28 September 2025]

Revised [30 Oktober 2025]

Accepted [31 Oktober 2025]

#### KEYWORDS

Accountability, Transparency, Community Participation.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat desa, khususnya dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 90 responden di Desa Pulau Kemuning, Kecamatan Sungai Are, pada tahun 2025. Variabel independen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas ( $X_1$ ) dan transparansi ( $X_2$ ), sedangkan variabel dependen adalah partisipasi masyarakat ( $Y$ ). Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan uji validitas, reliabilitas, uji t, uji F, dan koefisien determinasi ( $R^2$ ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, akuntabilitas pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dengan nilai t sebesar  $8,400 > 1,997$  dan signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Transparansi juga berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai t sebesar  $3,732 > 2,447$  dan signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Secara simultan, kedua variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dengan nilai F sebesar  $145,896 > 3,10$  dan nilai  $R^2$  sebesar  $0,770$ . Hal ini menunjukkan bahwa 77% variasi partisipasi masyarakat dapat dijelaskan oleh akuntabilitas dan transparansi. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

#### ABSTRACT

This study aims to determine the effect of village government accountability and transparency on community participation in village infrastructure development. The background of this research lies in the importance of implementing good governance principles at the village level, particularly in ensuring transparent and accountable management of village funds to encourage active community involvement. This research employs a quantitative approach using a survey method, distributing questionnaires to 90 respondents in Pulau Kemuning Village, Sungai Are District, in 2025. The independent variables are accountability ( $X_1$ ) and transparency ( $X_2$ ), while the dependent variable is community participation ( $Y$ ). The results of multiple linear regression analysis show that, partially, accountability has a positive and significant effect on community participation, with a t-value of  $8.400 > 1.997$  and a significance level of  $0.000 < 0.05$ . Similarly, transparency also has a positive and significant effect, with a t-value of  $3.732 > 2.447$  and a significance level of  $0.000 < 0.05$ . Simultaneously, both variables have a positive and significant effect on community participation, as indicated by an F-value of  $145.896 > 3.10$  and a coefficient of determination ( $R^2$ ) of  $0.770$ , meaning that 77% of the variation in community participation is explained by accountability and transparency. These findings indicate that enhancing accountability and transparency in managing village finances and development activities strengthens public trust and encourages more active community participation in village infrastructure development.

## PENDAHULUAN

Pembangunan desa memiliki tujuan sebagai upaya untuk memajukan kesejahteraan, meningkatkan mutu hidup manusia, dan penyediaan kebutuhan pokok agar tingkat kemiskinan berkurang, mengembangkan kekuatan ekonomi domestik, mengembangkan sarana dan prasarana, serta dapat secara terus menerus memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang ada. Tujuan tersebut telah dijelaskan pada UU No. 6 Tahun 2014. Agar suatu wilayah dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan, maka diperlukan komponen kependudukan yang berkualitas, sehingga dapat mengolah dan mengendalikan sumber daya alam secara benar, akurat dan maksimal dengan stabil menjaga kelestarian lingkungan Agustiani & Solihat, dalam Sukarman (2022).

Menurut Melis dalam Sukarman (2022) Dalam mencapai tujuan pembangunan, kita harus mengeksplorasi, mengembangkan, dan memanfaatkan sepenuhnya semua potensi alam. Selain itu juga mengembangkan potensi manusia dalam bentuk sosial, pengetahuan dan keterampilan yang harus ditingkatkan untuk merealisasi potensinya, potensi alam tersebut dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal.

Pembangunan infrastruktur pedesaan yang semakin meningkat karena infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga pemerintah menghadapi kendala pembiayaan dan hambatan terhadap perlawanan masyarakat. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam pembangunan pedesaan. Diharapkan dengan partisipasi masyarakat, kedua persoalan tersebut dapat diselesaikan, dan pemerintah desa serta masyarakat juga memperoleh manfaat lain dari kedua belah pihak. Partisipasi merupakan prinsip dasar yang harus dimiliki oleh masyarakat untuk melakukan pengembangan serta Pembangunan membutuhkan kontribusi masyarakat secara nyata dari berbagai pihak pemangku kepentingan untuk melakukan penyusunan rencana program, sehingga masyarakat yang terlibat dapat mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan sangat penting dalam pembangunan.

## LANDASAN TEORI

### Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk sikap pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya pemerintah desa dan implementasi kebijakan- kebijakan yang diamanahkan pada entitas pelapor guna tercapainya tujuan yang telah ditentukan secara teratur (Sukarman dkk, 2022). Adapun menurut Ardiyanti, dalam (Prihasantyo dkk 2022) . Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari pihak yang diberi keyakinan dimana nantinya hendak menciptakan keberhasilan maupun kegagalan dalam penerapan tugasnya guna menggapai tujuan yang sudah diresmikan.

Menurut (Sukarman,2022) menerangkan bahwa akuntabilitas memiliki empat dimensi yang diantaranya yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum
2. Akuntabilitas proses
3. Akuntabilitas program
4. Akuntabilitas kebijakan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan ajaran yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan pemerintah desa wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban pertanggungjawaban dalam pelaksanaan oleh sebuah organisasi untuk tercapainya sebuah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media yang telah disediakan dan dilaksanakan secara periodic (Ramadhani & Yulianti, 2021). Oleh karena itu, semakin baik akuntabilitas atas suatu kegiatan maka cenderung semakin baik efektifitas pengelolaan alokasi dana desa yang terjadi. Putra & Rasmini, dalam (Asmaul husnah dkk, 2023). Jabbara dan Dwivedi dalam Darlena (2024) mengemukakan bahwa tujuan akuntabilitas adalah untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggungjawaban hendak dilaksanakan, metode apa yang dipakai untuk melaksanakan tugas, bagaimana realitas pelaksanaannya dan apa dampaknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Mpuga dalam (Darlena dkk 2024) menyatakan bahwa akuntabilitas yang lebih baik sangat penting untuk mengurangi terjadinya korupsi dan memperbaiki penyelenggaraan pelayanan publik. (Trihastuti dan meirinawati 2024) menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan. Dalam konteks pengelolaan dana desa, akuntabilitas mencakup aspek hukum, manajerial, programatik, kebijakan, dan finansial. Tingkat akuntabilitas yang tinggi akan mengurangi risiko penyimpangan, mendorong efisiensi pelaksanaan program, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa (Yanto & Aqfir,

2021). pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah, akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa (Alfajar et al., 2024).

### **Transparansi**

Adapun Pengertian Menurut Mulyaningsih dalam (Purwanti, 2021) transparansi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi. Sehingga dengan adanya transparansi dapat membangun kepercayaan masyarakat melalui adanya akses yang memadai untuk mendapatkan informasi yang akurat, sehingga dapat diartikan sebagai tindakan yang memungkinkan suatu persoalan yang jelas serta dapat dipahami oleh kalangan masyarakat dan dapat dibuktikan kebenarannya.

Menurut Rachmawaty dalam Sukarman dkk (2022), Mengemukakan berbagai dimensi transparansi yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Transparansi kejujuran dan hukum
2. Transparansi proses
3. Transparansi program
4. Transparansi kebijakanKeterjangkauan harga

Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan prinsip keterbukaan informasi kepada publik, baik terkait perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan program pembangunan. Permendagri No. 113 Tahun 2014 menegaskan bahwa informasi mengenai pengelolaan keuangan desa harus tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat. Tujuan utama transparansi adalah untuk menciptakan akuntabilitas publik, mendorong partisipasi masyarakat, serta meminimalkan potensi korupsi dalam pengelolaan dana publik (Dewi & Sapari, 2020).

Rendahnya tingkat transparansi juga bisa dilihat dari kurangnya sosialisasi mengenai produk hukum yang memungkinkan adanya pelanggaran hukum karena masyarakat tidak paham terhadap berbagai peraturan perundangan yang mengatur kehidupan mereka (Alfajar et al., 2024).

### **Partisipasi Masyarakat**

Pengertian partisipasi menurut Zamroni dalam (Aditya Fathony 2024), Merupakan semua anggota masyarakat suatu negara yang memiliki suara didalam pembentukan dan pengambilan keputusan yang bersifat secara langsung maupun melalui organisasi yang mewakili kepentingan masyarakat umum. Selanjutnya Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti dalam (Aditya Fathony 2024), mengemukakan bahwa partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan. Partisipasi masyarakat intinya ialah agar masyarakat umum atau sebanyak mungkin orang ikut serta dengan pemerintah memberikan bantuannya guna meningkatkan, memperlancar, mempercepat dan menjamin berhasilnya usaha pembangunan. Partisipasi masyarakat berarti masyarakat ikut serta, yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah karena kenyataannya pemerintahlah yang sampai dewasa ini merupakan perancang, penyelenggara, dan pembayar utama dari pembangunan. Masyarakat diharapkan ikut serta, karena anggapan bahwa hasil pembangunan yang dirancang, diselenggarakan dan dibiayai terutama oleh pemerintah itu dimaksudkan untuk sebesar besar kesejahteraan masyarakat sendiri, untuk rakyat banyak.

### **Pembangunan**

Menurut Saul M. Katz dan Tjokrowinoto dalam Dewi Sarah Simbolon (2021), menyatakan bahwa pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional yang satu menuju ke kondisi lain, yang dipandang lebih baik. Pembangunan itu sendiri dapat pengurangan kesenjangan pemberantasan kemiskinan absolute dan diartikan sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu skema baru otonomi daerah yang di dalamnya termuat semangat melibatkan masyarakat, dengan menekankan kualitas otonomi daerah akan ditentukan oleh sejauh mana keterlibatan masyarakat, maka dengan sendirinya harus adanya seluruh aspirasi masyarakat semenjak dini, Abe (Dewi Sarah Simbolon 2021)., Menurut Davis dan Newstorm dalam (Dewi Sarah Simbolon 2021), bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi pada tujuan kelompok dan masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi.

Dalam konteksnya yang luas, pembangunan mempunyai beberapa pengertian yang didasarkan pada sudut pandang yang berbeda-beda. Beberapa pengertian pembangunan tersebut ialah, Pembangunan adalah perubahanperubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Pembangunan adalah pertumbuhan

Pertumbuhan maksudnya, kemampuan suatu negara untuk terus selalu berkembang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif sehingga cakupannya adalah seluruh segi kehidupan. Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak akan terjadi dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan sehingga dibutuhkan suatu rangkaian usaha secara sadar dilakukan. Pembangunan adalah sesuatu rencana yang tersusun secara rapi. ( Obd Mlik 2022).

### Infrastruktur

Berdasarkan Peraturan Presiden No.38/2015 mendefinisikan infrastruktur sebagai salah satu teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung jaringan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

## METODE PENELITIAN

### Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2021), validasi adalah sesuatu yang telah menunjukan sejauh mana kemampuan alat ukur apa yang akan diukur. uji validitas berfungsi untuk memastikan bahwa alat ukur tersebut valid atau tidaknya. maksud dari alat ukur dalam penelitian adalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang dibuat secara tertulis atau sering disebut kuesioners atau angket yang disebarkan kepada objek atau responden yang bersangkutan yaitu hasil dari penelitian ini sudah bisa dikatakan tepat atau valid jika adanya kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya pada objek. Untuk uji validitas dengan melakukan pengamatan korelasi antara skor masing-masing item kedalam alat ukur dengan total skor yang akan diukur dengan menggunakan cofficent corelaction pearson. . berikut adalah dasar pengambilan suatu keputusan untuk uji validitas pada penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Jika  $r_{hitung}$  dan  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka variabel valid
- b. Jika  $r_{hitung}$  Negative serta  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka variabel tersebut tidak valid

### Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan alat yang akan digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan sebuah indikator dari suatu variabel, suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban dari seseorang terhadap pertanyaan merupakan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. menurut Muhidin Dan Abdurahman (2020), uji reliabilitas adalah suatu instrumen pengukuran yang dapat dikatakan reliabel jika pengukurannya konsisten dan akurat sehingga hasilnya dapat dipercaya. agar tercapainya kesesuaian data yang didapat dengan tujuan pengukuran maka pada uji reliabilitas ini menggunakan metode Alpa Cronbach, s 0 sampai 1. Nilai Alpa Cronbach, s bisa dikatakan reliable jika memiliki nilai mulai dari >60, jadi jika nilai Alpa cronbach, s dibawah atau <0, 60 berarti dapat di katakana kurang reliabel, jika nilai Alpa Cronbach, s mencapai 1, 00 maka dapat dikatakan sangat reliabel.

### Uji Regresi Linear Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis regresi berganda, untuk tujuan memprediksi seberapa besar kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. persamaan regresinya Sugiyono (2021):

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana Y : partisipasi Masyarakat

a : Konstanta

b : Koefisien arah regresi

X<sub>1</sub> : Akuntabilitas

X<sub>2</sub> :Transparansi

Analisis regresi berganda adalah untuk mengetahui tingkat pengaruh variabel bebas dan variabel terikat secara kuantitatif. Besarnya pengaruh dari masing-masing variabel bebas tersebut dapat diperkirakan dengan melakukan interpretasi angka koefisien regresi partial b.

### Uji Determinasi

Menurut Sugiyono (2021) "koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) Dapat digunakan untuk mengetahui prosentasi perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan karena variabel bebas (X), Jika R<sup>2</sup> Semakin besar maka prosentasinya perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X) semakin tinggi. jika R<sup>2</sup> semakin kecil. maka presentase perubahan variabel tidak bebas (Y)

yang disebabkan variabel (X) bebas rendah. Untuk mengetahui kontribusi Variabel X terhadap Variabel Y, dapat dicari dengan menggunakan Rumus koefisien determinasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini dianalisis dengan mengkorelasi antara skor total dari masing-masing variabel. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana butir-butir pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang hendak diteliti. Suatu item dinyatakan valid apabila nilai r-hitung lebih besar daripada r-tabel. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai r-tabel pada penelitian ini sebesar **0,205** dengan taraf signifikansi 5% dan jumlah responden berjumlah 90.

#### Uji Validitas Akuntabilitas $X_1$

Berdasarkan hasil uji validitas yang ditampilkan pada Tabel 4.1, seluruh butir pernyataan pada variabel Akuntabilitas ( $X_1$ ) memiliki nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel (0,205). Nilai r-hitung berkisar antara 0,746 hingga 0,904, yang berarti seluruh item pernyataan dinyatakan valid. Dengan demikian, seluruh butir pertanyaan pada variabel Akuntabilitas layak digunakan dalam penelitian.

**Tabel 1. Hasil Uji Validitas Akuntabilitas ( $X_1$ )**

No.	Item Pertanyaan	R-Tabel	R- Hitung	Keterangan
1.	X <sub>1.1</sub> (Pemerintah desa memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas untuk pengelolaan dana desa)	0,205	0,904	Valid
2.	X <sub>1.2</sub> (Ada sistem pengawasan internal dan eksternal yang efektif terhadap penggunaan dana desa)	0,205	0,880	Valid
3.	X <sub>1.3</sub> (Terdapat mekanisme yang jelas untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana desa)	0,205	0,746	Valid
4.	X <sub>1.4</sub> (Laporan tahunan penggunaan dana desa tersedia dan dapat diakses oleh Masyarakat)	0,205	0,858	Valid
5.	X <sub>1.5</sub> (Ada mekanisme evaluasi yang adil terkait pemberian sanksi (punishment) dan penghargaan (reward) bagi perangkat desa)	0,205	0,797	Valid

(Sumber Data: SPSS versi 16, 2025)

#### Uji Validitas Transparansi ( $X_2$ )

Hasil uji validitas terhadap variabel Transparansi ( $X_2$ ) menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan memiliki nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel (0,205). Nilai r-hitung berkisar antara 0,817 hingga 0,886, sehingga semua item dinyatakan valid. Artinya, setiap item pertanyaan pada variabel ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat transparansi secara akurat.

**Tabel 2 Hasil Uji Validitas Transparansi  $X_2$**

No.	Item Pertanyaan	R-Tabel	R- Hitung	Keterangan
1.	X <sub>2.1</sub> (Pemerintah desa secara berkala melaporkan perolehan dan penggunaan dana desa (APBDes) kepada masyarakat)	0,205	0,817	Valid
2.	X <sub>2.2</sub> (Informasi mengenai kegiatan desa yang telah dilaksanakan dipublikasikan secara rutin)	0,205	0,869	Valid
3.	X <sub>2.3</sub> (Pemerintah desa secara berkala menginformasikan pencapaian prestasi yang telah diraih)	0,205	0,886	Valid

(Sumber Data: SPSS versi 16, 2025)

### Uji Validitas Partisipasi Masyarakat Y

Hasil uji validitas untuk variabel Partisipasi Masyarakat (Y) juga menunjukkan bahwa semua item pernyataan memiliki nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel (0,205). Nilai r-hitung berada pada rentang 0,839 hingga 0,887, sehingga seluruh item dinyatakan valid. Dengan demikian, semua butir pertanyaan pada variabel ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam penelitian ini.

**Tabel 3. Hasil Validitas Partisipasi Masyarakat (Y)**

No.	Item Pertanyaan	R-Tabel	R- Hitung	Keterangan
1.	Y <sub>1.1</sub> (Adanya kelompok-kelompok masyarakat (misalnya, BPD, karang taruna) yang dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat)	0,205	0,887	Valid
2.	Y <sub>1.2</sub> (Masyarakat diberi kesempatan untuk terlibat langsung dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program desa)	0,205	0,839	Valid
3.	Y <sub>1.3</sub> (Ada forum atau kegiatan rutin bagi Masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan saran terkait program desa)	0,205	0,883	Valid

(Sumber Data: SPSS versi 16, 2025)

Berdasarkan hasil uji validitas seluruh variabel penelitian ( $X_1$ ,  $X_2$ , dan Y), diketahui bahwa semua butir pernyataan memiliki nilai r-hitung lebih besar daripada R-tabel (0,205). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid dan layak digunakan untuk tahap analisis berikutnya.

### Uji Reliabilitas

**Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas**

No.	Variabel	Nilai Alpha Cronback	Keterangan
1.	Akuntabilitas ( $X_1$ )	0,894	5
2.	Transparansi ( $X_2$ )	0,820	3
3.	Partisipasi Masyarakat (Y)	0,828	3

(Sumber Data: SPSS versi 16, 2025)

Nilai Akuntabilitas ( $X_1$ ) dengan  $\alpha = 0,894$  masuk pada rentang 0,80–0,90 (mendekati batas atas), sehingga dapat dikatakan memiliki konsistensi internal yang tinggi (baik–sangat baik). Ini menunjukkan bahwa kelima butir pada skala akuntabilitas saling berkorelasi dengan baik dan bersama-sama mengukur konstruk yang sama. Karena  $\alpha$  mendekati 0,90, perlu juga diwaspadai kemungkinan duplikasi/overlap butir (butir yang terlalu mirip). Namun nilai ini pada umumnya menunjukkan instrumen yang reliabel dan layak digunakan untuk analisis lanjutan. Transparansi ( $X_2$ ) dengan  $\alpha = 0,820$ , variabel transparansi memiliki reliabilitas yang baik. Jumlah butir yang sedikit biasanya membuat  $\alpha$  cenderung lebih rendah; oleh karena itu nilai 0,820 untuk 3 butir menunjukkan korelasi antar-butir yang cukup kuat dan instrumen ringkas namun konsisten. Partisipasi Masyarakat (Y) dengan nilai  $\alpha = 0,828$  juga menunjukkan reliabilitas baik untuk konstruk partisipasi masyarakat. Sama seperti  $X_2$ , tercapainya  $\alpha > 0,80$  pada skala 3 butir menunjukkan hubungan internal antar-butir cukup kuat dan layak dipertahankan.

### Hasil Uji Linear Berganda

**Tabel 5. Hasil Uji Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	1.085	.698		.124
	Akuntabilitas	.387	.046	.644	.000
	Transparansi	.267	.071	.286	.000

a. Dependent Variable: Partisipasi Masyarakat (Sumber Data: SPSS versi 16, 2025)

Uji regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas ( $X_1$ ) dan Transparansi ( $X_2$ ), sedangkan variabel dependennya adalah Partisipasi Masyarakat ( $Y$ ). Koefisien Regresi Akuntabilitas ( $b_1$ ) = 0,387. Nilai ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan Akuntabilitas, maka Partisipasi Masyarakat akan meningkat sebesar 0,387 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan. Karena nilai Sig. = 0,000 < 0,05, maka pengaruh Akuntabilitas terhadap Partisipasi Masyarakat signifikan. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat akuntabilitas, semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang diamati.

Koefisien Regresi Transparansi ( $b_2$ ) = 0,267. Nilai ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan Transparansi, maka Partisipasi Masyarakat meningkat sebesar 0,267 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan. Karena nilai Sig. = 0,000 < 0,05, maka pengaruh Transparansi. Artinya, semakin terbuka suatu lembaga atau program (misalnya dalam penyampaian informasi, pelaporan, atau pengambilan keputusan), maka masyarakat akan lebih termotivasi untuk ikut serta dalam kegiatan.

Makna dan arah hubungan nilai koefisien regresi bernilai positif untuk kedua variabel ( $X_1$  dan  $X_2$ ), menunjukkan bahwa arah hubungan antara Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Partisipasi Masyarakat adalah positif. Dengan kata lain, peningkatan akuntabilitas dan transparansi akan berbanding lurus dengan peningkatan partisipasi masyarakat. Adapun nilai koefisien Beta standar (Standardized Coefficients Beta) menunjukkan besarnya pengaruh relatif. Akuntabilitas dengan hasil nilai  $\beta$  sebesar 0,644, memberikan pengaruh lebih besar terhadap partisipasi masyarakat dibandingkan dengan transparansi dengan nilai  $\beta$  = 0,286, ini berarti Akuntabilitas adalah faktor dominan dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat.

Hasil uji menunjukkan bahwa baik Akuntabilitas ( $X_1$ ) maupun Transparansi ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Partisipasi Masyarakat ( $Y$ ), dengan nilai signifikansi masing-masing 0,000 < 0,05. Faktor Akuntabilitas memiliki pengaruh dominan dibandingkan Transparansi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat.

### Uji Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah Akuntabilitas ( $X_1$ ) dan Transparansi ( $X_2$ ), sedangkan variabel dependennya adalah Partisipasi Masyarakat ( $Y$ ).

Tabel berikut menunjukkan hasil uji determinasi yang diperoleh dari output analisis regresi linier berganda menggunakan program SPSS.

**Tabel 6. Hasil Uji Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.878 <sup>a</sup>	.770	.765	1.268

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas  
(Sumber Data: SPSS versi 16, 2025)

### Uji T

**Tabel 7. Hasil Uji t**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.085	.698		1.554	.124
Akuntabilitas	.387	.046	.644	8.400	.000
Transparansi	.267	.071	.286	3.732	.000

a. Dependent Variable: Partisipasi Masyarakat  
(Sumber Data: SPSS versi 16, 2025)

Nilai konstanta menunjukkan besarnya nilai Partisipasi Masyarakat ( $Y$ ) apabila variabel Akuntabilitas ( $X_1$ ) dan Transparansi ( $X_2$ ) bernilai nol. Artinya, jika tidak ada penerapan akuntabilitas dan transparansi sama sekali, maka nilai dasar Partisipasi Masyarakat masih berada pada angka 1,085 satuan. Namun karena nilai ini tidak signifikan (Sig. = 0,124 > 0,05), maka konstanta tidak berpengaruh

secara statistik terhadap model regresi, melainkan hanya sebagai nilai dasar. Pengaruh Variabel Akuntabilitas ( $X_1$ ) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y) dengan nilai Koefisien regresi (B) = 0,387 Artinya, setiap peningkatan satu satuan pada variabel Akuntabilitas akan meningkatkan Partisipasi Masyarakat sebesar 0,387 satuan, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nilai t hitung adalah 8,400 dengan Nilai signifikansi (Sig.) = 0,000, Karena nilai Sig. < 0,05 (0,000 < 0,05) dan nilai t hitung (8,400) > t tabel (sekitar 2,000), maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Partisipasi Masyarakat. Adapun nilai Beta ( $\beta$ ) = 0,644 menunjukkan bahwa di antara variabel independen yang diuji, Akuntabilitas memiliki pengaruh dominan terhadap Partisipasi Masyarakat karena nilai beta-nya paling besar dibandingkan variabel lainnya. Interpretasi substantif menunjukkan semakin tinggi tingkat akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan misalnya keterbukaan laporan keuangan, kejelasan tanggung jawab, serta keandalan pelaksanaan program maka semakin tinggi pula partisipasi masyarakat yang muncul. Pengaruh Variabel Transparansi ( $X_2$ ) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y) dengan Koefisien regresi (B) = 0,267 Artinya, setiap peningkatan satu satuan pada variabel Transparansi akan meningkatkan Partisipasi Masyarakat sebesar 0,267 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap. Nilai t hitung didapatkan nilai 3,732, dengan Nilai signifikansi (Sig.) = 0,000, karena nilai Sig. < 0,05 (0,000 < 0,05) dan t hitung (3,732) > t tabel ( $\approx$ 2,000), maka Transparansi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Partisipasi Masyarakat. Adapun nilai Beta ( $\beta$ ) = 0,286 menunjukkan bahwa pengaruh Transparansi terhadap Partisipasi Masyarakat juga kuat, meskipun tidak sebesar pengaruh Akuntabilitas.

Interpretasi substantif menunjukkan bahwa peningkatan keterbukaan informasi, kemudahan akses publik terhadap proses dan hasil kegiatan, serta kejelasan dalam penyampaian keputusan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam berbagai program. Masyarakat akan lebih berpartisipasi ketika mereka merasa dilibatkan dan memperoleh informasi yang transparan.

Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa variabel Akuntabilitas ( $X_1$ ) dan Transparansi ( $X_2$ ) masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Partisipasi Masyarakat (Y). Di antara keduanya, variabel Akuntabilitas memiliki pengaruh yang lebih dominan dengan nilai Beta sebesar 0,644 dan t hitung sebesar 8,400. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi akuntabilitas dan transparansi dalam suatu kegiatan, maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat yang terlibat di dalamnya.

## Uji F

Uji F atau simultaneous test digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam model regresi, yaitu Akuntabilitas ( $X_1$ ) dan Transparansi ( $X_2$ ), secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Partisipasi Masyarakat (Y). Berikut hasil uji F yang diperoleh dari output analisis regresi menggunakan program SPSS versi 23.

**Tabel 8. Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	469.118	2	234.559	145.896	.000 <sup>b</sup>
Residual	139.871	87	1.608		
Total	608.989	89			

a. Dependent Variable: Partisipasi Masyarakat

b. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas

(Sumber Data: SPSS versi 16, 2025)

Nilai F hitung berdasarkan hasil analisis tersebut mendapatkan hasil sebesar 145,896 menunjukkan besarnya pengaruh gabungan antara variabel Akuntabilitas ( $X_1$ ) dan Transparansi ( $X_2$ ) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y). Nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,000 jauh lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan ( $\alpha = 0,05$ ). Artinya, hasil uji F signifikan secara statistik, sehingga model regresi yang digunakan layak untuk digunakan dalam analisis. Sebagai perbandingan F hitung dengan F tabel, dengan jumlah variabel independen ( $k = 2$ ) dan jumlah sampel ( $n$ ) adalah 90 ( $df \text{ residual} = 87 \rightarrow n - k - 1 = 87 \Rightarrow n = 90$ ). Maka F tabel pada  $\alpha = 0,05$  dengan  $df_1 = 2$  dan  $df_2 = 87$  adalah sekitar 3,10. Karena F hitung (145,896) > F tabel (3,10), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi secara simultan signifikan.

Berdasarkan hasil uji F di atas dapat dijelaskan bahwa variabel Akuntabilitas ( $X_1$ ) dan Transparansi ( $X_2$ ) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Partisipasi Masyarakat (Y). Artinya, ketika prinsip akuntabilitas dan transparansi diterapkan secara bersamaan dalam suatu program atau kegiatan, maka akan memberikan dampak yang kuat terhadap peningkatan partisipasi masyarakat. Nilai F hitung yang sangat besar (145,896) menunjukkan bahwa model regresi yang dibangun memiliki kemampuan

prediktif yang tinggi, di mana kedua variabel bebas mampu menjelaskan sebagian besar variasi dari variabel dependen. Dengan demikian, model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini signifikan secara keseluruhan dan dapat dipercaya untuk menjelaskan hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil uji F dapat disimpulkan nilai F hitung sebesar 145,896 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (Sig. < 0,05). Hal ini berarti bahwa variabel Akuntabilitas ( $X_1$ ) dan Transparansi ( $X_2$ ) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Partisipasi Masyarakat ( $Y$ ). Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak dan signifikan, serta mampu menjelaskan hubungan antara kedua variabel independen dengan variabel dependen secara menyeluruh.

#### Sejarah Singkat Desa Pulau Kemuning

Desa Pulau Kemuning, yang saat ini terletak di Kecamatan Sungai Are, Kabupaten OKU Selatan, menyimpan kisah masa lalu yang diwariskan secara turun-temurun. Menurut penuturan Bapak Nopriyansa selaku Kepala Desa, asal-usul nama desa ini tidak terlepas dari kondisi tempatnya yang unik.

Sebelum menjadi sebuah desa, wilayah Pulau Kemuning merupakan sebuah daratan yang menjorok ke sungai dan dikelilingi air, menyerupai sebuah pulau kecil. Pada pulau kecil itulah, tumbuh subur sejenis pohon yang bunganya berwarna kuning terang, menyerupai kemuning. Karena pemandangannya yang khas, para pendahulu kemudian menyebut tempat itu dengan nama Pulau Kemuning.

Pada awalnya, kehidupan masyarakat di Pulau Kemuning sangat bergantung pada hasil alam, di mana sungai yang mengelilingi menjadi sumber mata pencaharian utama, seperti menangkap ikan. Sementara itu, lahan di daratan ditanami berbagai jenis tumbuhan pangan dan hasil bumi seperti kopi. Nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan sudah tertanam sejak awal, membantu mereka menghadapi tantangan dari alam yang masih liar. Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk semakin bertambah. Sejak saat itu, mereka mulai menyusun tata kelola desa secara lebih teratur, ditandai dengan pemilihan pemimpin desa pertama, atau yang dikenal sebagai bapak Rio, yang menjadi penanda dimulainya era pemerintahan desa.

**Tabel 9 SOP Penggunaan Dana Desa Pulau Kemuning**

No.	Tahapan Proses	Uraian Prosedur	Pelaksana	Dokumen/ Kelengkapan	Keluaran
<b>I. Perencanaan Penggunaan Dana Desa</b>					
1.	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)	Melakukan musyawarah dengan BPD dan unsur masyarakat untuk menyepakati prioritas pembangunan dan program/kegiatan yang akan didanai DD.	Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat	Hasil Musrenbangdes, Data Profil Desa, RPJMDes	Daftar Prioritas Penggunaan Dana Desa
2.	Penyusunan RKP Desa	Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahunan berdasarkan hasil Musrenbangdes	Kepala Desa, Tim Penyusun RKP Desa	RPJMDes, Daftar Prioritas Dana Desa	Dokumen RKP Desa
3.	Penetapan APB Desa	Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) dan menetapkannya menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.	Kepala Desa, Kaur Keuangan, BPD	RKP Desa, Rancangan APB Desa	Peraturan Desa tentang APB Desa
<b>II. Pencairan dan Penyaluran Dana Desa</b>					
1.	Pengajuan Permintaan Penyaluran Tahap I	Pemerintah Desa mengajukan permintaan penyaluran dana desa Tahap I (maksimal 40%)	Kepala Desa, Kaur Keuangan	Perdes APB Desa, Lembar Evaluasi RAPBDes dari Camat	Surat Permintaan Penyaluran Dana Desa Tahap I

		kepada Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota melalui Kepala DPMD/Badan Keuangan).			
2.	Penyaluran DD dari Pusat ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)	Kementerian Keuangan menyalurkan dana desa dari RKUN ke RKUD.	Kemenkeu, Pemda (Badan Keuangan)	Surat Permintaan Penyaluran Pemda	Dana desa Masuk ke RKUD
3.	Penyaluran dana desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD)	Pemda menyalurkan dana desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa.	Pemda (Badan Keuangan)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Dana DD Masuk ke RKD (Siap Digunakan)
<b>No.</b>	<b>Tahapan Proses</b>	<b>Uraian Prosedur</b>	<b>Pelaksana</b>	<b>Dokumen/ Kelengkapan</b>	<b>Keluaran</b>
<b>III. Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa</b>					
1.	Penarikan Dana dari RKD	Kepala Desa dan Bendahara Desa melakukan penarikan dana dari RKD sesuai kebutuhan pendanaan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa.	Kepala Desa, Bendahara Desa	RAK Desa, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Bukti Penarikan Bank	Dana Tunai/Non-Tunai siap dibelanjakan
2.	Pelaksanaan Kegiatan dan Pembelanjaan	Melaksanakan kegiatan pembangunan/pemberdayaan sesuai APB Desa dan Pedoman Teknis, termasuk proses pengadaan barang/jasa, dan mendokumentasikan setiap transaksi.	Pelaksana Kegiatan (Kaur/Kasi), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Bendahara Desa	DPA/DPPA, SPP, Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi/Nota Pembelian, Kontrak Kerja	Kegiatan Terlaksana (Pembangunan/Pemberdayaan)
<b>IV. Pertanggungjawaban dan Pelaporan</b>					
1.	Pertanggungjawaban Pembelanjaan (SPJ)	Bendahara Desa menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas semua pengeluaran dan menyampaikannya kepada Kepala Desa.	Bendahara Desa	Kwitansi, Bukti Transfer, Laporan Penggunaan Dana	Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Bulanan/Triwulanan
2.	Pelaporan Realisasi (Tahap II & III)	Desa mengajukan permintaan penyaluran tahap berikutnya dengan melampirkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya, serta laporan lainnya (misalnya laporan output kegiatan).	Kepala Desa, Kaur Keuangan	Lembar Evaluasi SPJ Desa dari Camat, Laporan Realisasi Penyerapan dan Output	Surat Permintaan Penyaluran dana desa Tahap II/III

3.	Laporan Akhir Tahun Anggaran	Menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa (Akhir Tahun) dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun kepada Bupati/Walikota melalui Camat.	Kepala Desa, Kaur Keuangan	Laporan Realisasi, Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Keuangan	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahunan
<b>V. Monitoring dan Evaluasi (Money)</b>					
1.	Monitoring dan Evaluasi di Tingkat Desa	BPD dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penggunaan DD.	BPD, Masyarakat	Laporan Realisasi, Dokumen Kegiatan	Catatan Hasil Pengawasan
2.	Monitoring dan Evaluasi di Tingkat Kecamatan/Kabupaten	Pemerintah Daerah (Camat dan OPD terkait) melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan, peraturan, serta capaian output kegiatan.	Camat, DPMD, Inspektorat	Laporan Desa, Dokumen Proyek, Data Siskeudes	Laporan Hasil Monev dan Saran Perbaikan

Sumber Data: Hasil Penelitian 2025

### Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dalam konteks pembangunan pedesaan, keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan setiap program, terutama pembangunan infrastruktur yang langsung menyentuh kebutuhan dasar warga. Partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan dalam tahap pelaksanaan, tetapi juga sejak tahap perencanaan hingga evaluasi program. Namun, tingkat partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pemerintah desa mampu menjalankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam hal akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas menuntut agar setiap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program desa dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada masyarakat. Sementara itu, transparansi menuntut adanya keterbukaan informasi, baik terkait anggaran, kegiatan, maupun hasil pembangunan yang telah dicapai, agar masyarakat dapat mengakses dan memahami jalannya pemerintahan secara menyeluruh.

Pemerintah desa dalam praktiknya mampu menyusun mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, menyediakan laporan penggunaan dana secara terbuka, serta melibatkan pengawasan internal dan eksternal, cenderung memperoleh kepercayaan lebih tinggi dari masyarakat. Begitu pula dengan transparansi, yang terlihat dari keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi melalui laporan keuangan, publikasi kegiatan, serta pencapaian yang telah diraih. Ketika dua aspek ini berjalan secara optimal, masyarakat akan merasa memiliki ruang yang aman dan terbuka untuk berpartisipasi, baik melalui forum diskusi, kelompok masyarakat seperti BPD dan Karang Taruna, maupun melalui keterlibatan langsung dalam proses pembangunan. Indikator terkait evaluasi pemberian sanksi dan penghargaan bagi perangkat desa ( $X_{1.5}$ ) memperoleh skor 4,27. Nilai ini mencerminkan bahwa pemerintah desa telah berupaya membangun sistem evaluasi kinerja yang adil, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Mekanisme ini penting untuk meningkatkan akuntabilitas individu dalam pengelolaan dana desa dan mendorong peningkatan kinerja aparatur melalui sistem reward and punishment yang jelas dan konsisten.

Adapun indikator dengan nilai terendah adalah keterbukaan laporan tahunan penggunaan dana desa kepada masyarakat ( $X_{1.4}$ ) dengan skor 4,19. Meskipun nilainya masih tergolong baik, hasil ini mengindikasikan perlunya peningkatan dalam aspek transparansi publik, terutama dalam memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Transparansi laporan tidak hanya memperkuat partisipasi warga dalam pengawasan, tetapi juga membangun kepercayaan terhadap kinerja pemerintah desa secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap tiga indikator keterbukaan informasi publik di tingkat desa, dapat disimpulkan bahwa secara umum pemerintah desa telah menunjukkan kinerja yang baik dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Indikator tertinggi terdapat pada aspek pelaporan perolehan dan penggunaan dana desa (APBDes) ( $X_{2.1}$ ) dengan nilai 4,30, yang mencerminkan transparansi fiskal yang kuat dan komitmen dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya, publikasi kegiatan desa secara rutin ( $X_{2.2}$ ) juga dinilai cukup baik dengan skor 4,21, menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat meskipun masih dapat ditingkatkan dari segi konsistensi dan kedalaman informasi. Sementara itu, indikator mengenai penyampaian pencapaian prestasi desa ( $X_{2.3}$ ) mendapat nilai terendah, yaitu 4,19, yang mengindikasikan perlunya perhatian lebih dalam menginformasikan keberhasilan yang telah diraih. Informasi mengenai prestasi desa tidak hanya penting sebagai bentuk akuntabilitas, tetapi juga dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam mendukung program pembangunan. Dengan demikian, meskipun ketiga indikator menunjukkan capaian yang baik, peningkatan kualitas dan intensitas komunikasi publik tetap perlu dilakukan untuk memperkuat akuntabilitas dan partisipasi warga dalam pembangunan desa.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap tiga indikator partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dapat disimpulkan bahwa tingkat keterlibatan warga sudah cukup baik dan menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam membangun budaya demokratis dan inklusif. Indikator dengan nilai tertinggi, yaitu ( $Y_{1.3}$ ) keberadaan forum atau kegiatan rutin untuk menyampaikan pendapat (4,37), mencerminkan bahwa masyarakat memiliki ruang yang jelas dan aktif untuk menyuarakan aspirasi, saran, serta evaluasi terhadap program desa. Di sisi lain, ( $Y_{1.1}$ ) pembentukan kelompok-kelompok masyarakat seperti BPD dan Karang Taruna juga telah berjalan cukup efektif dengan nilai 4,22, menunjukkan adanya wadah-wadah formal yang mampu menampung dan menyuarakan kepentingan warga secara kolektif. Namun, indikator ( $Y_{1.2}$ ) partisipasi langsung masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program desa memperoleh nilai terendah (4,20), yang menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat masih dapat ditingkatkan, terutama dalam tahap-tahap pengambilan keputusan dan implementasi program. Meskipun secara umum mekanisme partisipasi masyarakat telah berjalan baik, ke depan perlu ada penguatan dalam memastikan semua kelompok masyarakat benar-benar terlibat secara langsung dan setara dalam setiap tahapan pembangunan desa.

### **Pengaruh Akuntabilitas Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil uji t variabel Akuntabilitas ( $X_1$ ) terhadap Partisipasi Masyarakat ( $Y$ ) menunjukkan  $t_{hitung} 8.400 > t_{tabel} 1.997$  dengan nilai Sig.  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Partisipasi Masyarakat ( $Y$ ) sehingga hipotesis  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Akuntabilitas secara umum dapat diartikan sebagai permintaan pertanggungjawaban atas pemenuhan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya. Dalam tugasnya mengaudit laporan keuangan, auditor dituntut bekerja dengan akuntabilitas yang tinggi dan secara profesional. Hal ini untuk memenuhi permintaan klien yang menginginkan kinerja yang tinggi. Adapun menurut para ahli, seperti yang dikemukakan oleh Hulme dan Tunner dalam Vikrama (2017), bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Nadia (2021) bahwa Alokasi Dana Desa memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Evi Damayanti (2022) berdasarkan hasil penelitian, bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Baruga Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial Akuntabilitas Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembangunan Infrastruktur.

### **Pengaruh transparansi Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil uji t variabel Transparansi ( $X_2$ ) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y) menunjukkan  $t_{hitung} 3.732 > t_{tabel} 2.447$  dengan nilai Sig.  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa Tranparansi ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Partisipasi Masyarakat (Y) sehingga hipotesis  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Menurut Mulyaningsih (2019) dalam (Purwanti, 2021) transparansi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi. Sehingga dengan adanya transparansi dapat membangun kepercayaan masyarakat melalui adanya akses yang memadai untuk mendapatkan informasi yang akurat, sehingga dapat diartikan sebagai tindakan yang memungkinkan suatu persoalan yang jelas serta dapat dipahami oleh kalangan masyarakat dan dapat dibuktikan kebenarannya.

Berdasarkan hasil analisis verifikatif, bahwa Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur memiliki hubungan yang positif serta mempunyai hubungan yang kuat. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Partisipasi Masyarakat akan diikuti oleh kenaikan Pembangunan Infrastruktur. Adapun pengaruh secara parsial Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Infrastruktur pada Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembangunan Infrastruktur.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Sedy (2020) di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Prvinsi Riau, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Masloman (2023) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maredaren Kiama Kecamatan Melonguane.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Infrastruktur sebagaimana Tjokrowinoto (2012:41) yang mengemukakan bahwa pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya “desa yang mandiri”, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumbu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan.

### **Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Infrastruktur Desa**

Nilai F hitung berdasarkan hasil analisis tersebut mendapatkan hasil sebesar 145,896 menunjukkan besarnya pengaruh gabungan antara variabel Akuntabilitas ( $X_1$ ) dan Transparansi ( $X_2$ ) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y) dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar  $0,000 < \alpha = 0,05$ . Berdasarkan hasil uji F di atas dapat dijelaskan bahwa variabel Akuntabilitas ( $X_1$ ) dan Transparansi ( $X_2$ ) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Partisipasi Masyarakat (Y). Artinya, ketika prinsip akuntabilitas dan transparansi diterapkan secara bersamaan dalam suatu program atau kegiatan, maka akan memberikan dampak yang kuat terhadap peningkatan partisipasi masyarakat, sehingga hipotesis  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Hasil uji t Akuntabilitas ( $X_1$ ) dan Transparansi ( $X_2$ ) masing-masing juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Partisipasi Masyarakat (Y). Akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar  $0,000 < \alpha = 0,05$ , namun akuntabilitas memiliki pengaruh yang lebih dominan dengan nilai t hitung sebesar 8,400. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi akuntabilitas dan transparansi dalam suatu kegiatan, maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat yang terlibat di dalamnya.

Hasil uji linear ganda juga menunjukkan bahwa baik Akuntabilitas ( $X_1$ ) maupun Transparansi ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Partisipasi Masyarakat (Y), dengan nilai signifikansi masing-masing  $0,000 < 0,05$ . Faktor Akuntabilitas memiliki pengaruh dominan dibandingkan Transparansi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat. Selain itu, hasil uji determinasi ( $R^2$ ) didapatkan Nilai R Square ( $R^2$ ) sebesar 0,770 berarti bahwa 77,0% variasi yang terjadi pada variabel Partisipasi Masyarakat (Y) dapat dijelaskan oleh variasi pada Akuntabilitas ( $X_1$ ) dan Transparansi ( $X_2$ ), dengan kata lain, kombinasi kedua variabel ini memberikan kontribusi sebesar 77% terhadap peningkatan partisipasi masyarakat, sementara sisanya sebesar 23% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti faktor sosial, ekonomi, budaya, atau kebijakan pemerintah. Selisih antara  $R^2$  dan Adjusted  $R^2$  yang kecil ( $0,770 - 0,765 = 0,005$ ) menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan stabil dan tidak terjadi overfitting, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua variabel independen memang memiliki pengaruh nyata terhadap variabel dependen.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Pengaruh Akuntabilitas Pemerintah Desa terhadap Partisipasi Masyarakat, berdasarkan hasil uji parsial (uji t), diperoleh nilai t hitung sebesar 8,400 > t tabel 1,997 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa. Artinya, semakin tinggi tingkat akuntabilitas pemerintah desa dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban program pembangunan, maka semakin besar pula keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.
2. Pengaruh Transparansi Pemerintah Desa terhadap Partisipasi Masyarakat, berdasarkan hasil uji t menunjukkan nilai t hitung 3,732 > t tabel 2,447 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, yang berarti bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi oleh pemerintah desa mampu menumbuhkan kepercayaan publik, sehingga masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.
3. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa secara Simultan terhadap Partisipasi Masyarakat, berdasarkan hasil uji F diperoleh F hitung sebesar 145,896 > F tabel 3,10 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa. Nilai koefisien determinasi  $R^2 = 0,770$  menunjukkan bahwa 77% variasi partisipasi masyarakat dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sedangkan sisanya 23% dipengaruhi oleh faktor lain seperti sosial, ekonomi, budaya, dan kebijakan pemerintah.

### Saran

1. Bagi Pemerintah Desa Pulau Kemuning
  - a. Pemerintah desa perlu meningkatkan kapasitas dan komitmen aparatur desa dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui pelatihan, pendampingan, serta evaluasi kinerja secara berkala.
  - b. Pemerintah desa hendaknya memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal agar setiap penggunaan dana pembangunan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan efisien. Transparansi perlu ditingkatkan dengan memperluas akses publik terhadap informasi melalui papan informasi desa, website, media
  - c. sosial, serta musyawarah desa secara rutin agar masyarakat merasa dilibatkan dalam setiap tahap pembangunan.
2. Bagi Masyarakat Desa
  - a. Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam memberikan masukan, menghadiri rapat-rapat desa, dan turut mengawasi pelaksanaan pembangunan agar prinsip *bottom-up development* dapat terwujud.
  - b. Kesadaran partisipatif masyarakat perlu diperkuat dengan memahami bahwa keterlibatan mereka dalam proses pembangunan akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan bersama.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
  - a. Disarankan agar penelitian berikutnya menambah variabel lain seperti kepercayaan publik, kepemimpinan kepala desa, atau kualitas komunikasi pemerintah desa untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat.
  - b. Penelitian juga dapat menggunakan pendekatan kualitatif atau metode *mixed methods* untuk menggali aspek-aspek sosial dan budaya yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat secara lebih mendalam

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanti, (2019), Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. *Skripsi thesis Universitas Islam Negeri Walisongo*. Semarang
- Darlana, D., Susanti, N., & Noviantoro, R. (2021). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik: Studi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 1(1), 12-25.

- Fathony, A. A., & Sitokmabin, L. (2024). Pengaruh akuntabilitas dana desa dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur pada pemerintahan desa dan kelurahan di kecamatan baleendah kabupaten bandung. *Akurat| jurnal ilmiah akuntansi fe unibba*, 15(01), 117-133.
- Ghozali, imam dan Hengky latan (2020), *Partial least squares konsep dan aplikasi dengan program smart PLS 3. 0*. Universitas diponegoro semarang
- Hadawiya, R., Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3 (2), 192-200.
- Husna, A., & Rahayu, S. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 1033-1040.
- Imawati, I. (2024). Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Di Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Tahun 20182022: Dana Desa, Infrastruktur Desa. *Eba Journal: Journal Economic, Bussines and Accounting*, 11(2), 169-179.
- Juniaswati, K. T., & Murdiansyah, I. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Sabilillah Kota Malang Berdasarkan ISAK 35. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(1), 118.
- Khairaturrahmi, & Ibrahim, R. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(1), 111–119
- Mlik, O., Renouw, A. A., & Banea, A. (2022). Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Kampung Klawaren, Distrik Wemak, Kabupaten Sorong. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(03), 998-1007.
- Nugroho, P. S., Wahyuningsih, P., & Alliyah, S. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada 10 Pemerintah Desa Di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(1).
- Purwanti, U. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 3(2), 79–90.
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 132–158.
- Rachmawaty, D. (2015). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat) (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).
- Rahmawati, R., Mone, A., & Mustari, N. (2021). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Program Inovasi Desa Budi Daya Jamur Tiram Di Desa Jenetaesa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(2), 590-604.
- Ramadhani, N. S., & Yuliati, A. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *JURNAL PROAKSI Journal*, 8(2), 51–60.
- Ramadhani, N. S., & Yuliati, A. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Proaksi*, 8(2), 561–571.
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295-302.
- Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). Peran akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa indonesia terhadap kepercayaan masyarakat desa: kasus di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1).
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D* (Edisi terbaru). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sukarman, S., & Rohim, R. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. *Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu*, 4(1), 27-40.
- Yanto, E., & Aqfir, A. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa. *Economy Deposit Journal (E DJ)*, 2(2).

- Alfajar, M. I., Fitriano, Y., & Kresnawati, K. (2025). The Influence Of Transparency, Participation And Accountability Of Village Fund Management In Seluma Regency. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(2), 115-124.
- Fathony, A. A., & Sitokmabin, L. (2024). Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. *AKURAT| Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 15(01), 117-133.
- Nurman. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo. Persada.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. (2012). *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Vikrama, A. A. (2017). "Evaluasi Transparansi dan Akuntabilitas Inventarisasi BMD pada Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli". *Citizen Charter*, 2(2).